

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup berbagai aspek. Dalam proses pembangunan, pada dasarnya dipengaruhi oleh 2 dimensi yaitu dimensi makro dimana institusi pemerintah dapat memengaruhi proses perubahan yang ada dalam masyarakat melalui kebijakan dan peraturan dan dimensi mikro dimana proses perubahan dipengaruhi oleh individu, keluarga dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kedua dimensi tersebut saling berkaitan dan akan mempengaruhi proses perubahan yang ada dalam masyarakat.¹

Pembangunan nasional merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan negara Indonesia seperti yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan nasional ini mencakup upaya peningkatan berbagai aspek seperti aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan dapat berupa pembangunan ideologi.

Dalam pembangunan nasional terdapat pendekatan pembangunan sosial yang saling bekerja sama dengan pembangunan fisik dan pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga berkaitan erat dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Pendekatan pembangunan berpusat pada manusia merupakan suatu upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan fokusnya pada pemberdayaan dan pembangunan manusia.²

Di Indonesia, pembangunan sosial dan ekonomi hanya berfokus pada pengurangan angka kemiskinan dan program pengentasan kemiskinan sehingga isu mengenai pelestarian lingkungan hidup belum menjadi isu utama.

¹ Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pres hal 5-6

² *Ibid* hal 66

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) seringkali dipandang sebagai pembangunan yang menempatkan manusia sebagai prioritas dalam pembangunan dengan kesinambungan (*sustainable*) program pembangunan yang dilakukan para pelaku perubahan. Pembangunan dengan model ini sering mengabaikan unsur pelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan.³

Dalam melaksanakan pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) lebih sering dikaitkan dengan bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang utama di negara-negara berkembang yaitu pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi biasanya dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mendirikan UMKM bagi masyarakat. Hal ini jarang dikaitkan dengan pelestarian lingkungan hidup, namun di Kota Surabaya menjadikan lingkungan sebagai salah faktor dalam pelaksanaan pembangunan mereka melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

Dilansir dari merdeka.com pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya mengalami peningkatan, hal ini karena pemerintah kota Surabaya telah melakukan program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, dan menjadikan lingkungan sebagai salah satu faktor penting yang tidak boleh dilupakan dalam pembangunan. Faktor lingkungan ini dapat dikaitkan dengan pendekatan ekonomi melalui metode daur ulang dan pembentukan bank sampah, ini menunjukkan Surabaya telah melakukan pemanfaatan sampah sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.⁴

Berikut akan disajikan data mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya dari tahun ke tahun berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, sebagai berikut:

³ *Ibid* hal 68

⁴ <https://www.merdeka.com/uang/pemberdayaan-masyarakat-kunci-surabaya-genjot-ekonomi-daerah.html>
diakses 30 Oktober 2019

TABEL 1. 1 PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SURABAYA TAHUN 2015-2018

Tahun	Realisasi (%)
2015	5,97
2016	6,00
2017	6,13
2018	6,19

Sumber: RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa Kota Surabaya mengalami pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Selanjutnya akan disajikan data mengenai laju pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya di sektor-sektor yang tertinggi di tahun 2018 berdasarkan Badan Pusat Statistik kota Surabaya, sebagai berikut:

TABEL 1. 2 SEKTOR DENGAN LAJU PERTUMBUHAN TERTINGGI DI KOTA SURABAYA TAHUN 2018

Sektor	Laju Pertumbuhan (%)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,64
Informasi dan Komunikasi	6,93
Konstruksi	6,92
Transportasi dan Pergudangan	6,87
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Surabaya

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya ini dipengaruhi oleh berbagai sektor dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang menjadi sektor ke-5 tertinggi untuk laju pertumbuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa Surabaya menjadikan lingkungan sebagai salah satu faktor yang tidak boleh dilupakan dalam pembangunan di masyarakat dengan dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat salah satunya dalam pengelolaan sampah dengan memanfaatkan sampah sebagai

sumber daya melalui metode daur ulang atau disebut dengan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan dibentuknya bank sampah di Kota Surabaya.

Sampah merupakan hasil buangan dari kegiatan/aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak terpakai lagi dan dapat mengganggu bagi keberlangsungan hidup suatu lingkungan. Sampah menurut UU no 18 tahun 2008 terdiri dari 3 jenis, yaitu sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan rumah tangga sehari-hari), sampah sejenis rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan khusus, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lain) dan sampah spesifik (merupakan sampah jenis B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun, sampah puing bangunan, sampah akibat bencana, sampah yang belum dapat diolah dan timbul secara tidak periodik). Sampah saat ini telah menjadi permasalahan bagi perkotaan karena cepatnya pertambahan jumlah penduduk terutama terkait dengan pengelolannya karena berhubungan langsung dengan lingkungan tempat manusia tinggal.

Menurut World Bank, pertambahan jumlah timbulan sampah sangat cepat, dimana diketahui bahwa pada tahun 2002 dengan 2,9 miliar penduduk perkotaan maka sampah yang dihasilkan adalah sekitar 0,64 kg per orang per hari (0,68 miliar ton pertahun) dan pada tahun 2012 jumlah penduduk telah meningkat menjadi sekitar 3 miliar dan menghasilkan sampah 1,2 kg per orang per hari (1,3 miliar ton per tahun). Lalu diperkirakan bahwa jumlah timbulan sampah ini akan terus bertambah dan diprediksikan pada tahun 2025 dimana jumlah penduduk diperkirakan mencapai 4,3 miliar penduduk maka menghasilkan sekitar 1,42 kg per orang per hari sampah kota (2,2 miliar ton per tahun).⁵

Berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, salah satu penyebab pertambahan jumlah sampah adalah adanya peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang berpengaruh langsung terhadap semakin meningkat pula volume sampah yang dihasilkan dari kegiatan penduduk tersebut. Berikut data mengenai jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2007 hingga tahun 2016 :

⁵ Statistik Lingkungan Hidup 2018 <https://www.bps.go.id>

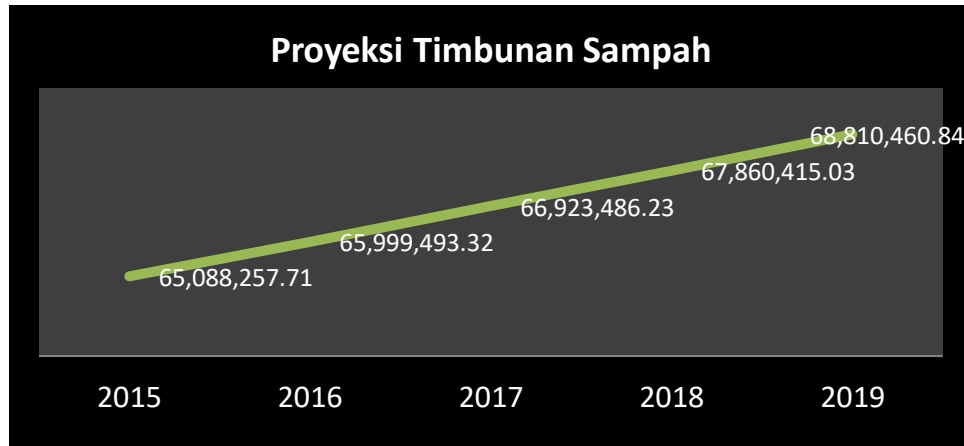
GRAFIK 1.1 JUMLAH PENDUDUK INDONESIA DAN PERTUMBUHANNYA TAHUN 2007-2016



Sumber : <https://lokadata.beritagar.id>

Pertambahan jumlah penduduk ini tentu menambah pula masalah yang akan dihadapi khususnya mengenai sampah. Sampah menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan kenyamanan lingkungan. Sampah yang berasal dari kampung-kampung biasanya hanya akan diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehingga menimbulkan persoalan bau tidak sedap di sekitar TPA tersebut dan terbatasnya lahan untuk TPA tersebut. Selain pertambahan jumlah penduduk, adanya pola perubahan konsumsi pada masyarakat khususnya di perkotaan dengan banyaknya restoran cepat saji yang menimbulkan sampah berupa wadah maupun peralatan makan sekali pakai. Hal-hal diatas menimbulkan timbunan sampah dengan volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam. Berikut akan disajikan proyeksi timbunan volume sampah menurut Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2018 – KEMEN LHK RI dari tahun 2015-2019:

GRAFIK 1. 2 PROYEKSI TIMBUNAN SAMPAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2019



Sumber : <https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/download/kebijakan-dan-strategi-nasional-pengelolaan-sampah-tahun-2018-kemen-lhk/>

Berdasarkan bagan diatas dapat diketahui bahwa proyeksi timbunan sampah meningkat dari tahun ke tahun sehingga diperlukan penanganan khusus terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah ini. Timbunan sampah yang menumpuk dan tidak diolah dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah seperti keindahan lingkungan menjadi tidak sedap dipandang, pencemaran air, udara, tanah (penumpukan sampah dapat menghasilkan limpasan cairan yang beracun yang kemudian dapat mengalir melalui sungai, air tanah dan tanah), timbunan sampah merupakan sumber munculnya penyakit seperti diare, adanya peningkatan gas rumah kaca (menurut World Bank dalam penanganan sampah yang buruk menyebabkan muncul emisi gas rumah kaca yang menyumbang 5% dari emisi global) dan juga menimbulkan masalah lain yaitu bencana banjir. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa sampah membawa dampak buruk yang merugikan baik bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah apabila tidak ada penanganan terkait pengolahan sampah dengan benar.

Berikut akan disajikan tabel mengenai produksi dan volume sampah yang terangkut per hari Ibukota Provinsi di Indonesia berdasarkan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2018:

TABEL 1. 3 PRODUKSI DAN VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT PER HARI TAHUN 2016-2017

Kota	Perkiraan Produksi Sampah Per Hari (m ³)		Volume Sampah Terangkut Per Hari (m ³)		Presentasi Sampah Terangkut (%)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Banda Aceh	800,97	275,00	703,45	250,00	87,82	90
Medan	1874,00	1892,00	1595,00	1675,00	85	88
Padang	520,00	624,24	323,00	495,50	62,12	79,38
Pekan Baru	745,19	764,19	332,54	362,28	44,63	47,4
Jambi	1537,00	1534,35	924,74	1059,01	60,95	69,02
Palembang	-	682,82	-	682,82	-	100
Bengkulu	172,87	774,86	456,54	452,57	42,55	58,41
Bandar Lampung	1287,02	800,00	1158,32	700,00	90	87,5
Pangkal Pinang	520,00	623,00	420,00	486,00	81	78
DKI Jakarta	7099,08	7164,53	6016,30	6872,18	84,75	95,92
Bandung	1469,00	1600,00	1100,00	1120,00	74,86	70
Semarang	5080,51	5163,72	4445,00	4544,00	87,49	88
Yogyakarta	904,80	1048,00	880,00	1040,00	97,26	99,24
Surabaya	9710,61	9896,78	5237,70	5427,45	53,93	54,84
Serang	1638,00	1638,00	710,00	710,00	43,3	43,3
Denpasar	3719,00	3657,20	3625,00	3276,55	97,47	89,59
Mataram	300,00	350,00	196,65	280,00	65,55	80
Kupang	655,00	684,00	504,00	552,00	76,95	80,7
Pontianak	1709,50	1802,50	1486,00	1547,00	86,93	86
Palangkaraya	800,00	892,50	425,00	435,50	53,13	48,79
Banjarmasin	576,00	568,00	437,00	545,30	76,00	96,00
Samarinda	835,57	686,56	520,78	217,24	62,23	31,67
Tanjung Selor	204,00	751,70	204,00	751,70	100	100
Manado	-	2064,00	-	1680,00	-	80
Palu	1041,72	1058,42	456,00	456,00	43,77	43,08
Makasar	5931,4	6485,65	5623,61	6163,42	94,81	95,03
Kendari	221,91	0,69	166,09	165,75	74,85	72,23
Gorontalo	486,24	490,14	335,00	367,39	68,90	74,96
Mamuju	187,00	192,00	71,58	97,77	38	51
Ambon	146,00	200,00	140,00	151,60	95,89	75,80
Ternate	59,60	60,64	46,42	43,23	78	71
Manokwari	-	113,32	-	25,23	-	22,26
Jayapura	-	416,55	-	44,76	-	11
Jumlah	50 231,99	54 955,36	38 539,72	42 677,25		

Sumber : Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018

Menurut tabel diatas, Surabaya dan Jakarta merupakan kota dengan Produksi Jumlah sampah per hari tertinggi daripada kota-kota lain di Indonesia. Surabaya menghasilkan 9710,61 m³ sampah per hari pada tahun 2016 dan 9896,78 m³ sampah per hari pada tahun 2017 sedangkan Jakarta menghasilkan 7099,08 m³ sampah per hari pada tahun 2016 dan 7164,53 m³ sampah per hari pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Surabaya berada pada tingkat lebih tinggi dalam produksi sampah dibanding Jakarta, namun volume sampah yang diangkut lebih rendah dibanding dengan di Jakarta. Volume sampah terangkut di Surabaya hanya berkisar 53%-55% sedangkan Jakarta berkisar 84%-95%. Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa volume sampah di Surabaya yang diangkut ke TPA hanya berkisar setengah dari jumlah produksi sampah per hari namun menurut Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya ternyata sampah-sampah lain yang tidak terangkut tersebut telah dipilah langsung oleh warga secara mandiri. Peraturan mengenai kewajiban memilah sampah ini sudah memiliki sanksi administrasi yang tertuang dalam Perwali No 10 Tahun 2017 yang merupakan usaha untuk memberikan efek jera bagi pihak yang tidak memilah sampah dari lingkungan tempat tinggal.

Terkait dengan permasalahan sampah di Kota Surabaya ini maka diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁶ Bentuk kerjasama yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya dengan kegiatan pengolahan sampah dari sumbernya, bank sampah dan adanya lomba-lomba kebersihan.

Berdasarkan Profil Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Kota Surabaya sendiri pada tahun 2006-2010 telah meraih penghargaan Adipura. Lalu pada tahun 2011-2015 dan 2017 telah meraih penghargaan Adipura Kencana untuk kategori kota Metropolitan, sedangkan pada

⁶ Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

tahun 2016 kota Surabaya telah meraih penghargaan Adipura Paripurna, yang merupakan penghargaan tertinggi kota/ibu kota yang memberikan kinerja terbaik untuk 2 kategori Adipura yaitu Adipura Kirana dan Adipura Buana. Hal ini menunjukkan bagaimana Surabaya berkomitmen dalam bidang lingkungan hidup.

Dalam hal pengelolaan sampah di Kota Surabaya sendiri mulai digagas oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak 2005 dan berhasil menjadi *pilot project* dalam program pemilahan sampah berbasis komunitas. Pengelolaan sampah ini dimulai melalui program 3R yaitu *Reduce, Reuse* dan *Recycle* yang menjadi landasan pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat dan karena keberhasilannya tersebut sehingga menjadikan Surabaya sebagai tuan rumah dalam Forum Regional 3R atau the 5th Regional 3R Forum in Asia & the Pacific dengan tema *Multilayer Partnership & Coalitions as the Basic 3R's Promotion in Asia & The Pacific*. Berkat keberhasilan ini pula menjadikan Surabaya sebagai role model bagi kota-kota lain seperti yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup.⁷

Dilansir dari laman berita detik.com dan bbc.com untuk mensukseskan pengelolaan sampah di Kota Surabaya ini maka Pemerintah Kota telah memiliki Fasilitator Lingkungan dan Kader Lingkungan yang merupakan agen perubahan dari pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal mengelola sampah. Pemerintah Kota Surabaya saat ini telah memiliki 26 rumah kompos dan pusat daur ulang sampah di Jambangan dan Sutorejo, namun dalam program pengelolaan sampah mandiri yaitu memilah sampah dari sumbernya maka terdapat 296 unit bank sampah yang dimaksudkan untuk mengurangi sampah yang akan diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan dapat memanfaatkan sampah tersebut sehingga menjadi memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga disebutkan dalam pasal 8 terkait dengan arah kebijakan

⁷ <http://www.mongabay.co.id/2014/02/27/surabaya-kota-percontohan-pengolahan-sampah-terbaik-indonesia/> (diakses 10 Januari 2019).

pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdapat 2 proses, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah ini meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah tersebut, sedangkan dalam penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Hal ini menunjukkan bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Kota Surabaya akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya maka di Kota Surabaya sendiri telah terdapat kegiatan dari pemerintah Kota Surabaya terkait dengan pengelolaan sampah, yaitu Surabaya Green and Clean, Eco School, Merdeka Dari Sampah, adanya pembentukan kader dan fasilitator lingkungan. Kegiatan-kegiatan ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam rangka untuk memberikan hidup yang layak bagi warga Surabaya dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terkait dengan permasalahan lingkungan yang merupakan komitmen dari pemerintah Kota Surabaya dalam memperhatikan lingkungan.⁸

Dalam kegiatan Merdeka Dari Sampah ini terdapat salah satu kampung di Medokan Semampir Surabaya yang mengusung nama Kampung Wisata Lingkungan dimana kampung ini terpilih sebagai kampung dengan pemilahan sampah terbaik dan terus melakukan inovasi-inovasi pengelolaan sampah seperti adanya bank sampah dan pengolahan sampah menjadi pupuk sampah yang dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan tanaman, serta mengolah sampah rumah tangga yang menghasilkan larva untuk dapat dijadikan makanan hewan seperti lele, bebek, ayam, brurung dan reptil. Hal ini tentu menjadikan sampah bukan lagi sebagai sesuatu yang tidak berguna namun merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat dengan pengelolaan yang baik. Bahkan cara pengelolaan sampah yang dilakukan ini menarik perhatian dari institut Sains dan Teknologi Akuatik dari Kementerian Perekonomian Swiss yang ada di Indonesia yaitu EAWAG ((Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung,

⁸ <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/laporan-utama/1115> (diakses 15 Januari 2019).

Abwasserreinigung und Gewässerschutz). Beberapa penghargaan yang sudah diraih oleh kampung ini adalah sebagai berikut :

1. Piagam penghargaan Pahlawan Lingkungan yang diperoleh oleh Bapak Suwandi SE pada tahun 2015
2. Pemenang Kampung Pemilahan Terbaik dari Program Merdeka Dari Sampah tahun 2014
3. Pemenang Kampung Partisipasi Terbaik dari Program Merdeka Dari Sampah Terbaik tahun 2015
4. Pemenang Kampung Penghijauan Terbaik dari Program Merdeka Dari Sampah Terbaik tahun 2016
5. Pemenang Kampung Pemilahan Terbaik dari Program Merdeka Dari Sampah tahun 2017
6. Pemenang Surabaya Green and Clean tahun 2018

Hal ini tentu menjadi menarik untuk diteliti karena pengelolaan sampah tentu tidak akan berhasil jika hanya dilakukan sendirian, diperlukan keinginan untuk bergerak bersama antar warga di Kampung Wisata Lingkungan sehingga dapat menjadikan kampungnya mendapatkan penghargaan. Hal tersebut yang menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang bagaimana yang dapat dilakukan sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan pengelolaan sampah bersama padahal diketahui jika sampah dipandang sebagai hal yang kotor dan menjijikan bagi orang-orang.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Talib dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palu” diketahui bahwa penelitian bertujuan untuk menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dikaji dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn berdasarkan 4 variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya (sumber daya manusia, biaya operasional dan sarana prasarana), karakteristik agen pelaksana dan sikap kecenderungan para pelaksana. Hasilnya, faktor pendukungnya adalah adanya aturan-aturan berupa undang-undang, perda, perwali lalu dukungan dari berbagai pihak, motivasi dari petugas operasional dan

program-program kebersihan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih belum adanya tenaga ahli dalam bidang pengelolaan sampah, masih kurang biaya operasional, sarana prasarana, petugas kebersihan dan kurangnya kesadaran serta partisipasi dari masyarakat setempat.

Dari hasil penelitian Talib tersebut, maka perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan oleh peneliti ada dalam fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian dahulu berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Selanjutnya, lokasi penelitian dahulu berada di kota Palu sedangkan penelitian ini berada di Kampung Wisata Lingkungan RW 02 Kelurahan Medokan Semampir Surabaya.

Hal berbeda dilakukan pada penelitian yang dilakukan oleh Agung Prasetya Mayangkara dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban”. Penelitian ini fokusnya pada evaluasi kebijakan dengan menggunakan indikator evaluasi milik William Dunn yang mencakup efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsitas dan ketepatan. Hasilnya adalah masih belum memenuhi semua indikator evaluasi yang digunakan. Dalam indikator efektifitas, masih terbatasnya jumlah anggaran pengelolaan sampah dan minimnya pemasukan untuk retribusi sampah; untuk indikator kecukupan, kurangnya jumlah SDM dalam pengelolaan TPA, jumlah peraturan daerah untuk kebijakan pengelolaan sampah masih sedikit dan terbatasnya bentuk kelembagaan dalam pengelolaan anggaran; untuk indikator pemerataan, cakupan pelayanan pengelolaan sampah belum maksimal; untuk indikator responsitas, diketahui bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah dan kemauan untuk reduksi sampah dari sumbernya; untuk indikator ketepatan, pemilihan sistem pengelolaan sampah yaitu *Controlled Landfill* belum sesuai dengan UU No 18 tahun 2008 yaitu *Sanitary Landfill*.

Dari penelitian milik Agung Prasetya meskipun sama dalam masalah pengelolaan sampah, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada fokus penelitian dan lokasi penelitian.

Penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi kebijakan pengelolaan sampah dan berlokasi di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban.

Hal berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fransiska Tanuwijaya dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan teori bentuk partisipasi masyarakat milik Kaho, yaitu partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil dan partisipasi dalam evaluasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah adalah motif ekonomi, motif sosial, motif psikologi, motivasi dan dukungan dari pemerintah, motivasi dan dukungan pengurus bank sampah, motivasi dan dukungan dari kader lingkungan, adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dan forum warga yang rutin dilaksanakan.

Dari hasil penelitian Fransiska, Talib dan Agung, jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, nampak ada perbedaannya yaitu pada fokus penelitian dan lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian milik Fransiska berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah dan berlokasi di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya. Sedangkan peneliti yang akan dilakukan oleh berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada untuk mengurangi sampah dari sumbernya sedangkan lokasi penelitian ini berada di Kampung Wisata Lingkungan RW 02 Kelurahan Medokan Semampir Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kampung Wisata Lingkungan Medokan Semampir Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara rinci tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kampung Wisata Lingkungan Medokan Semampir Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu yang mengkaji mengenai pengelolaan sampah, maka ditemukan adanya *gap* antara *state of the art* antara penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Talib berfokus pada pengelolaan sampah dalam perspektif implementasi kebijakan di kota Palu, sedangkan dalam penelitian kedua yang dilakukan oleh Agung Prasetya Mayangkara berfokus pada pengelolaan sampah dalam perspektif evaluasi kebijakan di TPA Gunung Panggung Tuban dan penelitian ketiga yang dilakukan oleh Fransiska Tanuwijaya berfokus pada pengelolaan sampah dalam perspektif partisipasi masyarakat di Bank Sampah Pitoe Jambangan Surabaya.

Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan secara rinci mengenai pengelolaan sampah yang dilihat dari perspektif pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengisi kekosongan yang ada dengan penelitian sebelumnya dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori dalam kajian Ilmu Administrasi Negara mengenai kebijakan dan pembangunan masyarakat yaitu tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah serta dapat menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Surabaya mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kampung Wisata Lingkungan Medokan Semampir Surabaya. Serta dapat menjadi motivasi bagi kampung-kampung lain di Kota Surabaya dalam meningkatkan peran mereka dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Pemberdayaan Masyarakat

1.5.1.1 Pengertian

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis dan secara sinergis dapat mendorong keterlibatan semua potensi yang ada. Hal ini memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk dan seimbang dalam hak dan kewajiban mereka. Sedangkan dalam pandangan Ife, pemberdayaan ditekankan tentang bagaimana meningkatkan kekuasaan untuk mereka yang kurang beruntung.⁹

Sedangkan pemberdayaan dalam pandangan Payne, dapat digunakan untuk membantu klien dalam memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terkait diri mereka, termasuk untuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan suatu tindakan. Hal ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri dalam menggunakan daya yang dimiliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.¹⁰

Pandangan lain mengenai pemberdayaan disampaikan oleh Shardlow, yaitu pemberdayaan digambarkan sebagai suatu gagasan yang membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha untuk dapat mengontrol kehidupan mereka dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.¹¹

⁹ Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta hal 74-75

¹⁰ Adi, Isbandi Rukminto. Op. Cit hal 78

¹¹ *Ibid* hal 78

Pandangan lain mengenai pemberdayaan juga disampaikan oleh Papiliya dan Zubaedi, yaitu pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada tersebut menjadi lebih nyata.¹²

Pemberdayaan dalam pandangan Onny S Priono dan Pranarka merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta dilaksanakan secara berkesinambungan baik individu atau kolektif untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada didalam dirinya sehingga dapat melakukan suatu perubahan sosial.¹³

Sedangkan dalam pandangan Slamet menjelaskan tentang masyarakat yang berdaya secara rinci, yaitu masyarakat yang tahu, mengerti, faham, termotivasi dan berkesempatan untuk memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mengetahui berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara tanggungjawab.¹⁴

Maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya bagaimana membuat individu/kelompok/komunitas untuk menjadi mengerti, faham dan termotivasi untuk mengembangkan potensi mereka dan memanfaatkan peluang yang ada dalam tindakan mereka untuk mencapai tujuan dan membentuk kemandirian dalam diri mereka.

Dalam pandangan Gunawan, konsep mengenai pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

1. Pemberdayaan dengan menciptakan iklim yang dapat meningkatkan potensi masyarakat sehingga masyarakat dapat berkembang.

¹² Prayitno, Ujianto Singgih. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika hal 54

¹³ Najiyati, Sri, dkk. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International-Indonesia Programme and Wildlife Habitat Canada hal 52

¹⁴ Prayitno, Ujianto Singgih. Op. cit, hal 55

2. Pemberdayaan untuk potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, misalnya peningkatan taraf peningkatan, derajat kesehatan, akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, informasi, teknologi, lapangan usaha dan pasar.
3. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi masyarakat, melalui perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kebersamaan serta kemitraan antara yang sudah maju dan yang belum berkembang.¹⁵

Pandangan dari David Matarrita-Cascante dan Mark A. Brennan dalam jurnal “*Conceptualizing community development in the twenty-first century*”, konsep mengenai pemberdayaan masyarakat saat ini adalah proses yang melibatkan organisasi, fasilitasi, dan tindakan, yang memungkinkan orang untuk membangun cara untuk menciptakan komunitas yang ingin mereka tinggali. Ini adalah proses yang memberikan visi, perencanaan, arahan, dan tindakan terkoordinasi menuju tujuan yang diinginkan terkait dengan promosi upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi di mana sumber daya lokal beroperasi. Dalam hal ini, pengembang komunitas memanfaatkan sumber daya ekonomi, manusia, dan fisik setempat untuk mengamankan kebutuhan sehari-hari dan menanggapi perubahan kebutuhan dan kondisi.¹⁶

Konsep pemberdayaan masyarakat saat ini memiliki kekuatan untuk memberikan peluang kepada masyarakat mengembangkan kapasitas untuk kemandirian dan memiliki kontrol atas pengambilan keputusan, dapat mengarahkan kepada inovasi yang baru, dapat mengarah pada upaya pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan, dan membangun “komunitas” yaitu dapat memunculkan rasa kepemilikan dan keterikatan.

¹⁵ Ruslan Malik dan Anwari WMK. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Khanata Pustaka LP3ES Indonesia hal 228

¹⁶ Cascante, David Matarrita dan Mark A. Brennan (2012). *Conceptualizing community development in the twenty-first century*. Community Development Vol. 43 No. 3 hal 293-305

1.5.2.2 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pandangan Soetomo, proses pemberdayaan masyarakat mengandung 2 unsur utama, yaitu pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat.¹⁷ Kedua unsur proses pemberdayaan masyarakat tersebut saling berkaitan sehingga apabila masyarakat memiliki kewenangan tetapi tidak memiliki kapasitas maka tidak akan memperoleh hasil yang maksimal karena masyarakat berada dalam posisi marginal. Posisi marginal ini yang nantinya akan dibuat menjadi lebih berdaya sehingga proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif.

Pada dasarnya konsep pembangunan berpusat pada masyarakat (*people centered development*) dalam pelaksanaannya berkaitan langsung dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang artinya, sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunan tersebut.¹⁸ Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam pengelolaan pembangunan, maka masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan.

Proses pemberdayaan mengandung 2 kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kedua, proses pemberdayaan lebih ditekankan pada kemampuan memberikan dorongan atau motivasi kepada individu agar mempunyai dan lebih berdaya. Dalam pandangan Korten, proses pemberdayaan dipahami melalui 2 dimensi, yaitu dimensi distributif dan dimensi generatif. Dimensi distributif menekankan *power* sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan dimensi generatif hanya akan diperoleh melalui tambahan atau peningkatan *power* (kelompok lemah) dengan mengurangi *power* kelompok lain.¹⁹

¹⁷ Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat : Mungkinkah Muncul Antitetisnya?. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal 88

¹⁸ *Ibid* hal 69

¹⁹ *Ibid* hal 60

Sebagai suatu proses, Pandangan dari Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto membahas tahapan-tahapan dalam pemberdayaan yang dibagi menjadi 3 proses, yaitu:²⁰

1. Tahapan penyadaran : dalam proses ini maka dilaksanakan tahap menyadarkan masyarakat dengan memberikan pemahaman agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mencari solusi untuk menghadapi permasalahan yang ada. Diperlukan akses terhadap informasi yang aktual dan akurat yang cukup dan adanya upaya pendampingan.
2. Tahapan pengkapasitasan : dalam proses ini bertujuan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola peluang yang ada dengan adanya aktivitas pengkapasitasan terhadap manusia yang merupakan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang dilaksanakan dengan kegiatan seperti pelatihan dan pendidikan, pengkapasitasan terhadap organisasi yang dilaksanakan dengan adanya restrukturisasi organisasi untuk memberikan budaya baru dan inovasi dalam organisasi dan pengkapasitasan terhadap sistem nilai yang dilaksanakan untuk membentuk aturan yang akan digunakan untuk mengelola peluang yang ada.
3. Tahapan pendayaan : dalam proses ini maka subjek pemberdayaan yaitu masyarakat diberikan peluang sesuai dengan kemampuan mereka agar berpartisipasi aktif dan berkesinambungan lalu secara bertahap diberikan peran lebih besar sesuai kapasitas dan kapabilitas mereka dan penyaluran aspirasi serta tuntunan agar mereka melakukan *self evaluation* atas pilihan mereka sehingga mereka menjadi lebih mandiri.

1.5.2.3 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri, meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang akan dilakukan. Kemandirian ini ditandai dengan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya dan kemampuan yang dimiliki dalam membuat keputusan dan tindakan.

²⁰ Wrihatnolo, Randy R dan Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo hal 2-5

1.5.2.4 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Dalam buku “Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut” yang ditulis oleh Sri Najiyati, Agus Asmana dan I Nyoman Suryadiputra menjelaskan bahwa terdapat 4 prinsip pemberdayaan, yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian dan keberlanjutan.

1. Kesetaraan

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, haruslah ada kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat begitu juga antara perempuan dan juga laki-laki. Tidak ada perbedaan kedudukan diantara pihak-pihak tersebut. Mekanisme yang dibangun adalah adanya hubungan kesetaraan dengan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, keahlian dan kemampuan antara satu dengan yang lainnya. Dalam proses pemberdayaan, pihak-pihak menuturkan kelebihan dan juga kekurangan yang dimilikinya sehingga akan terjadi suatu proses belajar bersama.

Terkadang dalam suatu proses pemberdayaan yang dilakukan terdapat suatu kesalahan yang dapat berakibat buruk bagi suatu pihak. Kesalahan tersebut terjadi ketika seorang pendamping atau pihak yang melaksanakan proses pelatihan selalu menjadikan dirinya sebagai guru yang mengetahui semuanya. Disisi lain, pihak masyarakat dianggap sebagai murid yang harus belajar ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan mendengarkan yang sedang disampaikan oleh pendamping pelatihan dan juga masyarakat seringkali melakukan apa yang diperintah oleh pihak pendamping pelatihan. Hal seperti ini seringkali terjadi karena pihak pendamping pelatihan ingin membagikan pengetahuan yang dimilikinya tanpa mengetahui pengetahuan dan kebutuhan yang dimiliki masyarakat. Namun sebaliknya, justru masyarakat lah yang memiliki pengetahuan lebih terhadap lingkungannya karena mereka yang hidup di lingkungan tersebut, dan merasakan permasalahan yang terjadi di desanya. Hal ini biasanya disebut dengan “Kearifan Lokal”.

2. Partisipatif

Pendapat dari Ndraha, pemerintah dan praktisi pemberdayaan masyarakat masih belum bersedia sepenuhnya untuk memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk dapat memilih dan merumuskan kebutuhan mereka. Pemerintah selalu terjebak dalam keinginannya untuk melihat langsung hasil pemberdayaannya sehingga masyarakat merasa diberi beban target untuk mencapai suatu kemajuan yang pesat tanpa melihat dari kemampuan dan potensi milik mereka. Terkadang sebuah proyek terlaksana padahal masyarakat tidak terlalu membutuhkannya, namun masyarakat merasa tertarik untuk mengerjakannya lantaran diberikan iming-iming berupa bantuan tanpa harus bersusah payah untuk memperolehnya. Hal ini mengakibatkan tidak adanya tantangan dan juga kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan keswadayaannya.

Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa perbaikan kondisi dan peningkatan ekonomi masyarakat dilakukan secara efisien. Namun, jika dilihat dari pendekatan tersebut, maka kemandirian yang dimiliki masyarakatnya tidak akan tumbuh secara sehat. Dengan adanya analisis tersebut, maka sering ditemukan proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah namun malah menjadi kurang terpelihara dan kurang dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan proyek-proyek swadaya murni yang telah direncanakan, dibiayai dan juga dilakukan oleh masyarakat jarang terbengkalai.

Broody dan juga Rogers berpendapat bahwa kemandirian seseorang akan tumbuh didalam lingkungan yang banyak memberikan pilihan dan juga tantangan dalam mencapai kesempurnaan kepribadian. Masyarakat juga akan menjadi terbiasa berfikir kreatif dalam menentukan pilihannya yang dirasa terbaik untuk dilakukan di lingkungannya dan masyarakat akan lebih memiliki tanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi dari pilihannya tersebut.

Program pemberdayaan yang bisa meningkatkan kemandirian masyarakatnya merupakan suatu program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan juga di evaluasi oleh masyarakat sendiri. Namun

untuk mencapai hal tersebut harus diperlukan waktu dan juga proses pendampingan secara intens terhadap program pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan

Verhagen menjelaskan bahwa prinsip keswadayaan adalah menghargai dan juga mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Didalam konsep ini, tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan menabung, pengetahuan tentang kendala yang terjadi pada usahanya, mengetahui kondisi lingkungan sekitarnya, memiliki tenaga kerja dan memiliki kemauan serta norma-norma bermasyarakat yang sudah lama mereka patuhi. Hal-hal tersebut harus digali dan juga harus dijadikan modal dasar dalam proses pemberdayaan. Bantuan yang diberikan orang lain yang bersifat materiil harus dianggap sebagai penunjang, sehingga bantuan tersebut tidak menjadi kelemahan dalam tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya” ini menjadi acuan dalam mengembangkan proses pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, bantuan teknis harus mengarah pada peningkatan kapasitasn sehingga masyarakat mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya.

4. Berkelanjutan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini kebanyakan berskala pada proses yang tegas terhadap batas waktu dan proses pendanaannya. Jika proyek tersebut telah selesai, pihak pelaksana sudah lepas tangan terkait pemberdayaan tersebut. Apakah kegiatan ini akan berlanjut atau tidak mereka sudah tidak mau tahu. Hal ini yang akan menjadikan “monumen fisik” dan akan menyebabkan masyarakat menjadi trauma dan apatis. Namun, proyek ini biasanya tidak terjadi pada masyarakat yang sudah sadar, justru masyarakat telah memiliki keberanian untuk menolak proyek-proyek yang akan timbul di lingkungannya.

Program pemberdayaan ini perlu dirancang sehingga akan terjadi proses keberlanjutan. Sehingga lambat laun, peran pendamping akan semakin berkurang

karena masyarakatnya telah mampu untuk mengelola kegiatannya sendiri tanpa bantuan peran pendamping tersebut.²¹

1.5.2.5 Indikator Pemberdayaan

Pendapat dari Suhendra, untuk mengetahui keberhasilan pemberdayaan masyarakat maka diperlukan indikator sebagai alat pengukur dengan membandingkan kriteria normatif dan realita yang ada. Indikator masyarakat yang berdaya, yaitu :²²

1. Memiliki kemampuan dalam menyiapkan dan menggunakan sumber-sumber yang ada.
2. Berjalannya proses perencanaan secara *bottom up*
3. Adanya kemampuan dan aktivitas ekonomi
4. Adanya kemampuan dalam menyiapkan masa depan secara mandiri
5. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa tekanan

1.5.2.6 Esensi Pemberdayaan

Pandangan dari David Corten (1983) yang dikutip dalam buku “Pemberdayaan Masyarakat” milik Prayitno menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki 3 esensi utama, yaitu :²³

1. Penyadaran: bagaimana untuk memunculkan kesadaran masyarakat yang akan diberdayakan sehingga memiliki kemampuan untuk ditingkatkan pendapatannya.

Banyak tokoh sebagai pelopor untuk perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, diantaranya adalah nabi Muhammad SAW, Karl Marx, Paulo Freire dan tokoh-tokoh pendidikan lain yang memiliki pengaruh di masyarakat. Tokoh-tokoh tersebut memberikan keyakinan bahwa perubahan harus dimulai dari perubahan atas diri sendiri sekaligus memiliki kesadaran terhadap realitas yang dihadapi dan memiliki keinginan untuk merubah realitas tersebut menjadi lebih baik.

²¹ Najiyati, Sri, dkk. Op.cit. hal 54-60.

²² Suhendra, K. Op. cit hal 86

²³ Prayitno, Ujianto Singgih. Op. cit hal 81

Pendapat dari Paulo Freire dalam “Konsep Penyadaran Menurut Paulo Freire dalam Perspektif Pendidikan Islam” yang merupakan seorang pemikir pendidikan berkebangsaan Brazil meyakini betapa pentingnya “penyadaran manusia” terhadap perubahan dalam masyarakat. Proses penyadaran yang dijelaskan oleh Freire mengarah pada konsep pembebasan yang dinamis dan “kemanusiaan yang lebih utuh”. Hasil dari proses penyadaran ini disebut dengan *conscientizacao*, atau tingkat kesadaran di mana individu mampu melihat sistem sosial secara kritis. Paulo Freire menempatkan kesadaran kritis sebagai puncak dari kesadaran manusia, berada di atas dua kesadaran lain yaitu kesadaran magis dan kesadaran naif. Kesadaran magis merupakan fase di mana orang mengadaptasi atau menyesuaikan diri secara fatalistik dengan sistem yang ada. Sedangkan kesadaran naif dicirikan dengan perilaku seseorang yang terlalu menyederhanakan dan meromantisasikan realitas, mereka mereformasi individu-individu yang tidak adil dengan asumsi bahwa sistem yang mewadahnya bisa bekerja secara tepat.²⁴

Penyadaran secara bahasa berasal dari kata "sadar" yang berarti merasa, tahu, dan ingat (tentang keadaan yang sebenarnya) atau keadaan ingat (tahu) akan dirinya. Dalam kamus istilah karya tulis ilmiah kata “sadar” diartikan dengan menyadari, insyaf, sadar, dan sadar diri. Kata sadar memiliki tiga makna yaitu: pertama, memahami atau mengetahui pada suatu tingkat pengamatan atau pemikiran yang terkendali. Kedua, mampu atau ditandai oleh pemikiran, kemampuan, rancangan atau persepsi. Ketiga, berbuat atau bertindak dengan pemahaman kritis.²⁵

Secara umum dapat dipahami bahwa penyadaran merupakan suatu upaya memunculkan kesadaran masyarakat untuk dapat melihat suatu sistem sosial secara kritis sehingga dapat memahami, memiliki persepsi dan bertindak sesuai dengan pemahaman mereka.

2. Motivasi: hal ini berkaitan dengan bagaimana untuk mengusahakan agar masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan untuk dapat menjadi lebih

²⁴ Madro'i (2012) Konsep Penyadaran Menurut Paulo Freire dalam Perspektif Pendidikan Islam. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

²⁵ Komaruddin, dkk. 2006. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, cet.III hal. 226.

berdaya. Motivasi diberikan untuk menghilangkan ketidakmauan dan ketidakmampuan masyarakat yang akan diberdayakan.

Pandangan dari Hamzah menjelaskan bahwa motivasi berasal dari kata motif yang berarti sebagai kekuatan yang terdapat didalam diri individu dan sebagai sebab individu tersebut akan bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah laku individu yang berupa rangsangan dorongan, atau pembangkit tenaga dari munculnya suatu tingkah laku tertentu.²⁶

Kerlinger, N. Fred dan Elazar J. Pedhazur dalam jurnal milik Cut Zurnali menyatakan bahwa kriteria motivasi terdiri dari:²⁷

(1) Motif atas kebutuhan dari pekerjaan (*Motive*)

Pandangan dari Cut Zurnali, motif adalah faktor-faktor yang menjadi sebab individu bertingkah laku atau bersikap tertentu. Hal ini berkaitan dengan bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kebutuhan apa yang dicoba dipuaskan oleh seseorang? Apa yang menyebabkan mereka melakukan sesuatu pekerjaan atau aktivitas?. Ini menunjukkan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan yang ada di dalam dirinya (*inner needs*) yang menyebabkan mereka didorong, ditekan atau dimotivasi untuk memenuhinya. Kebutuhan tertentu yang mereka rasakan akan menentukan tindakan yang mereka lakukan. Selanjutnya Cut Zurnali mengutip pendapat Fremout E. kast dan james E. Rosenzweig yang mendefinisikan *motive* adalah suatu dorongan yang datang dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau sedikitnya adalah suatu kecenderungan menyumbangkan perbuatan atau tingkah laku tertentu.

Pendapat lain dari William G Scott menerangkan bahwa *motive* adalah kebutuhan yang belum terpuaskan sehingga mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa *motive* adalah dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan guna memenuhi kepuasannya yang belum terpuaskan.

²⁶ B. Uno, Hamzah. 2008. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta : Bumi Aksara hal 23

²⁷ Zurnali, Cut. 2011. *Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Perilaku Produktif Karyawan di Divisi Long Distance PT Telkom, Tbk. Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Vol 4 No 1 hal 6-7

²⁸ Scott, G. William. 1962. *Human Relation in Management A Behavioral Science Approach*, Richard D. Irwin, Inc., Home Wood, Illionis hal 82

(2) Pengharapan atas lingkungan kerja (*Expectation*)

Berdasarkan pendapat dari Victor Vroom yang dikutip oleh Cut Zurnali menjelaskan bahwa ekspektasi adalah adanya kekuatan dari kecenderungan untuk bekerja secara benar tergantung pada kekuatan dari pengharapan bahwa kerja akan diikuti dengan pemberian jaminan, fasilitas dan lingkungan atau outcome yang menarik.

Cut Zurnali menjelaskan bahwa terdapat dua sumber besar yang dapat mempengaruhi kelakuan individu, yaitu: sumber-sumber harapan yang berkaitan dengan peranannya antara lain, tuntutan formal dari pihak pekerjaan yang terperinci dalam tugas yang seharusnya dilakukan. Dan tuntutan informal yang dituntut oleh kelompok-kelompok yang ditemui individu dalam lingkungan kerja. Pendapat dari Gary Dessler additionally menjelaskan bahwa dengan adanya keyakinan atau pengharapan untuk sukses dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan atau menggerakkan usahanya. Selanjutnya Vroom secara khusus memformulasikan teori expectancy mengusulkan ada 3 (tiga) konsep konsep dasar, yaitu: (1) Valence atau kadar keinginan seseorang; (2) Instrumentality atau alat perantara; (3) Expectancy atau keyakinan untuk mewujudkan keinginan itu sendiri.

(3) Kebutuhan atas imbalan (*Incentive*).

Dalam kaitannya dengan insentif (*incentive*), Cut Zurnali mengacu pada pendapat dari Robert Dubin yang menjelaskan bahwa pada dasarnya insentif itu adalah insentif adalah perangsang yang menyebabkan berlangsungnya kegiatan, memelihara kegiatan agar mengarah langsung kepada satu tujuan yang lebih baik dari yang lain. Sedangkan pendapat dari Morris S. Viteles, insentif merupakan keadaan yang membangkitkan kekuatan dinamis individu, atau persiapan-persiapan daripada keadaan yang mengantarkan dengan harapan agar dapat mempengaruhi atau mengubah sikap atau tingkah laku orang-orang. Dapat dipahami bahwa seseorang tidak banyak mengetahui tentang sesuatu hal, apabila mereka tidak didorong untuk melakukan pekerjaan yang demikian itu, yaitu apabila mereka tidak dibekali dengan insentif secara cukup.

3. Pemberian Akses: dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses pemberdayaan yang ada. Setelah menumbukan kesadaran dan kemauan masyarakat dengan motivasi maka diperlukan akses masyarakat terhadap sumber daya agar proses pemberdayaan dapat berjalan lancar. Sumber daya ini dapat berasal dari diri sendiri maupun dari luar, dengan bentuk dan macam akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

Pandangan dari Ribot dan Peluso dalam jurnal “Akses dan Strategi Aktor-Aktor dalam Pemanfaatan Sumber Daya Waduk Djuanda” menjelaskan bahwa akses merupakan bagaimana seharusnya identifikasi mekanisme yang melibatkan berbagai aktor yang terlibat untuk mendapatkan, mengendalikan dan mempertahankan aliran manfaat dan distribusinya. Mekanisme akses ini dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme akses berdasarkan hak dan mekanisme akses berdasarkan struktur dan relasi.²⁹

Dalam penelitian ini maka pemberian akses dimaksudkan sebagai identifikasi mekanisme yang melibatkan aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kampung Wisata Lingkungan untuk mendapatkan, mengendalikan dan mempertahankan aliran manfaat dan distribusi dari pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Selain mengenai ketiga aspek di atas dalam pandangan David Corten maka aspek lain yang juga penting menurut Adamson dan Bromiley (2008) dalam jurnal “*Effects of Stakeholder Conflicts on Community Development Projects in Kenya*” adalah bahwa kualitas hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) memainkan peran penting dalam kemampuan program untuk memberdayakan anggota masyarakat serta menciptakan suasana bagi masyarakat untuk berpengaruh terhadap penyediaan layanan. Adamson dan Bromiley lebih lanjut menemukan bahwa ketersediaan struktur kemitraan dalam masyarakat tidak dengan sendirinya mempromosikan pemberdayaan masyarakat. Mereka, bagaimanapun, mengulangi pentingnya praktik kerja kemitraan. Disimpulkan bahwa kemitraan atau kolaborasi pemangku kepentingan adalah produk dari

²⁹ Priyatna, Fatriyandi Nur, dkk. 2013. *Akses dan Strategi Aktor-Aktor dalam Pemanfaatan Sumber Daya Waduk Djuanda*. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8 No 1

aspirasi pemangku kepentingan untuk transformasi kehidupan di masyarakat. Secara tersirat, kemitraan muncul kapan pun para pemangku kepentingan menganggap upaya perubahan dan keterlibatan mereka sangat penting untuk memastikan perubahan positif.³⁰

Dalam penelitian ini, para pemangku kepentingan yaitu para agen perubahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Wisata Lingkungan dan Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS). Kemitraan yang terjadi antara para pemangku kepentingan tersebut menjadi penting sebagai upaya untuk melakukan proses penyadaran terhadap masyarakat dan juga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di Kampung Wisata Lingkungan.

Pandangan selanjutnya dari Charles Gyan dan Abena Oforiwaa Ampomah dalam jurnal *“Effects of Stakeholder Conflicts on Community Development Projects in Kenyase”* menyatakan bahwa hubungan di antara berbagai pelaku dan kemampuan mereka untuk memiliki visi, tujuan, atau kepentingan bersama atau bersama adalah prasyarat utama untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hubungan diantara para pemangku kepentingan harus terjalin dan berkoordinasi dengan baik sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berhasil.³¹

Senada dengan jurnal di atas maka dalam jurnal *“Non-governmental organizations and community development in Bangladesh”* juga menyatakan peran penting LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam meningkatkan partisipasi komunitas dalam kegiatan yang berkaitan dengan implementasi program, perencanaan, pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. LSM juga berperan dalam menciptakan sejumlah besar modal sosial melalui jejaring sosial dan kemitraan dengan banyak pemerintah dan LSM. Inisiatif mereka terhadap kesadaran masyarakat, pelatihan pengembangan keterampilan, kegiatan peningkatan pendapatan, kepercayaan sosial, kapasitas penilaian masalah, keterampilan tabungan dan kepemimpinan membantu memberdayakan

³⁰ Charles Gyan and Abena Oforiwaa Ampomah. 2016. *Effects of Stakeholder Conflicts on Community Development Projects in Kenyase*. Volume 6 issue 1 hal 1 –8

³¹ *Ibid*

masyarakat yang kurang beruntung.³² Dampak keseluruhan membawa perubahan sosial positif ke mata pencaharian masyarakat. Dalam penelitian ini Lembaga Swadaya Masyarakat yang dimaksud adalah Bank Sampah Induk Surabaya.

Selanjutnya pandangan dari Alesina dan La Ferrara (2000) dalam jurnal *“Effects of Stakeholder Conflicts on Community Development Projects in Kenya”* menyatakan bahwa tingkat partisipasi warga dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan positif dengan kepercayaan. Artinya, tingkat keterlibatan warga dalam kegiatan dan proses pemberdayaan masyarakat menentukan apakah mereka akan mengembangkan kepercayaan dan berkolaborasi dalam proses tersebut.³³

Pandangan lain mengenai partisipasi disampaikan oleh Robyn Eversole dalam jurnal *“Remaking participation: challenges for community development practice”* yaitu bahwa partisipasi sampai saat ini sebagian besar hanya bergerak dalam satu arah saja: masyarakat harus bersedia untuk memasuki medan orang lain dan belajar bermain dengan aturan mereka. Tantangan untuk memperbaharui partisipasi adalah membuatnya multi-arah. Pengembangan partisipatif yang sesungguhnya tidak hanya mengajarkan, melibatkan, dan memberdayakan masyarakat, tetapi juga mengajarkan, melibatkan, dan memberdayakan organisasi yang bekerja dengan masyarakat, untuk melihat dan melakukan berbagai hal secara berbeda. Tantangan untuk abad ke-21 adalah untuk membentuk kembali partisipasi: membingkai ulang interaksi antara komunitas, profesional, dan institusi menjadi 'ruang partisipatif' yang sesungguhnya. Untuk praktisi yang bekerja dengan komunitas, ini membutuhkan perhatian khusus untuk tidak hanya pengetahuan, institusi, dan praktik terbaik para profesional, tetapi juga pengetahuan, institusi, dan praktik terbaik komunitas. Yang penting, itu juga membutuhkan perhatian pada tantangan memfasilitasi titik pertemuan di antara mereka.³⁴

³² Islam, M Rezaul (2015). *Non-governmental organizations and community development in Bangladesh*. International Social Work Vol 60 issue 2 hal 1-15

³³ *Ibid*

³⁴ Eversole, Robyn (2012). *Remaking participation: challenges for community development practice*. Oxford University Press and Community Development Journal Volume 47 Issue 1 hal 29-41

Dalam penelitian ini akan dilihat mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan yang ada sehingga dapat diketahui kepercayaan masyarakat terhadap hubungan kemitraan diantara para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat ikut berkolaborasi di dalamnya. Partisipasi bukan hanya berasal dari masyarakat tetapi juga berasal dari para pemangku kepentingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga menjadi ruang partisipatif yang sesungguhnya dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

1.5.2 Pengelolaan Sampah

1.5.2.1 Pengelolaan

Pengelolaan ini erat kaitannya dengan konsep manajemen. Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 4 arti, pertama yaitu proses, cara, perbuatan mengelola, kedua yaitu proses melakukan kegiatan dengan menggerakkan orang lain, ketiga yaitu proses untuk membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi dan keempat yaitu proses pengawasan pada semua hal yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.³⁵

Pendapat dari Harsoyo menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” yang berarti serangkaian usaha untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Hal berbeda disampaikan oleh Wardoyo, pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁶

Hal senada disampaikan oleh Soewarno Handyaningrat, yaitu bahwa pengelolaan juga bisa diartikan sebagai penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi

³⁵ <https://kbbi.web.id/kelola> (diakses 20 April 2019)

³⁶ Hendro Pujo S. A. *Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. E-Journal Ilmu Pemerintahan. Vol 1 No 4 2013 hal 1377

lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.³⁷ Hal senada disampaikan pula oleh Adisasmita bahwa pengelolaan merupakan pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.³⁸ Pandangan lain disampaikan oleh George R. Terry bahwa pengelolaan merupakan pelaksanaan dari kegiatan manajemen yaitu suatu proses yang meliputi bimbingan atau pengarahan kepada sekelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.³⁹

Dari pendapat para ahli tersebut, maka peneliti mendefinisikan pengelolaan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam rangka memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari pengelolaan adalah untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dapat digerakan dengan sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pemborosan waktu, tenaga dan materi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi agar pencapaian tujuan dapat dicapai dengan mudah. Beberapa tujuan dari pengelolaan, yaitu:

1. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi organisasi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang memiliki kepentingan dalam organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam kinerja organisasi.

Pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen berdasarkan pandangan dari Soewarno Handyaningrat yaitu:⁴⁰

1. Planning (Perencanaan) : dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu dalam waktu yang akan datang berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan usaha

³⁷ Handyaningrat, Soewarno. 1997. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung hal 9

³⁸ Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu hal 22

³⁹ Terry, George R. Dan Leslie W. Rue. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara hal 1

⁴⁰ Handyaningrat, Soewarno. Op. cit hal 125-156

kegiatan yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan akan diputuskan mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut, siapa yang akan melaksanakan.

2. Organizing (Pengorganisasian) : berkaitan dengan pengelompokkan dan pengaturan pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memanfaatkan orang dan sumber daya secara efektif. Pengelompokkan ini berdasarkan fungsi/tugas, proses yang dirancang sedemikian rupa sehingga membentuk kesatuan kegiatan untuk mencapai tujuan.
3. Directing (Pengarahan) : berkaitan dengan bagaimana usaha yang dilakukan agar individu yang ada dalam organisasi berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pandangan G.R. Terry dalam buku “Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah”, pengarahan adalah bagaimana agar membuat semua anggota dalam kelompok bekerja sama secara ikhlas untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan dan usaha pengorganisasian.
4. Controlling (Pengawasan) : merupakan proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ada, tujuan yang telah disepakati, dan kebijakan yang ada. Pengawasan memiliki tujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan diperoleh secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang ada. Prosedur yang terdapat dalam pengawasan adalah observasi dan pemeriksaan, pemberian contoh, adanya catatan dan laporan, menentukan peraturan-peraturan dan tindakan disiplin.

Dalam konteks penelitian ini akan dibahas mengenai pengelolaan sampah di Kampung Wisata Lingkungan Medokan Surabaya. Sampah merupakan hasil buangan dari kegiatan/aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak terpakai lagi dan dapat mengganggu bagi keberlangsungan hidup suatu lingkungan sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengelola sampah sehingga sampah dapat diubah menjadi bermanfaat bagi manusia. Dalam penelitian ini maka dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber yang utama.

1.5.2.2 Sampah

Sampah merupakan hasil buangan dari kegiatan/aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak terpakai lagi dan dapat mengganggu bagi keberlangsungan hidup suatu lingkungan. Jumlah volume sampah yang dihasilkan akan sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas yang dilakukan, dan tingkat serta pola konsumsi penduduk yang ada. Semakin besar jumlah atau tingkat dan pola konsumsi maka akan semakin besar pula jumlah volume sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan jenis-jenis sampah, maka sampah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Sampah Organik

Sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Sampah organik dibedakan lagi menjadi sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah merupakan sampah dengan kandungan air yang cukup tinggi seperti sayuran dan kulit buah, sedangkan sampah organik kering merupakan sampah dengan kandungan air yang sedikit seperti kertas, kayu, daun-daun kering maupun ranting pohon.

2. Sampah Anorganik

Sampah jenis ini bukan berasal dari makhluk hidup biasanya berasal dari bahan yang bisa diperbarui. Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang masuk ke dalam kategori sampah yang bisa didaur ulang seperti sampah dengan bahan yang terbuat dari plastik dan logam.

3. Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Sampah jenis ini merupakan sampah dengan kategori yang berbahaya dan beracun bagi manusia. Biasanya sampah jenis ini mengandung merkuri maupun jenis racun lain yang berbahaya. Contoh sampah jenis ini adalah kaleng bekas cat semprot atau minyak wangi.

Dalam konteks penelitian ini maka jenis sampah yang akan menjadi objek peneliti merupakan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sampah hasil aktivitas rumah tangga seperti kulit buah dan sayuran, sedangkan sampah anorganik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sampah plastik. Fokus utama dalam penelitian ini

adalah pada pengelolaan sampah anorganik yaitu sampah plastik karena menjadi permasalahan besar di perkotaan terkait cara penanganannya karena sampah plastik merupakan sampah yang sulit terurai.

1.5.2.3 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah ini berkaitan erat dengan pengelolaan lingkungan hidup di suatu daerah ataupun negara. Pengelolaan ini dilakukan dengan menata suatu sistem yang ada, dan berkaitan dengan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen ini bertumpu pada kemampuan untuk menata pelaksanaan sistem yang berada dalam sistem tersebut.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti merujuk pada definisi pengelolaan, sehingga pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber yang utama untuk mencapai suatu tujuan yaitu peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat serta sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat bahkan pihak swasta untuk menangani permasalahan sampah yang ada karena sampah sudah menjadi ancaman kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan yang sehat merupakan aset penting bagi semua pihak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan sampah adalah telah diaturnya undang-undang tentang pengelolaan sampah yaitu UU No 18 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut, pengelolaan sampah memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.⁴¹

⁴¹ Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

1.5.2.4 Model Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di kota besar dapat dilakukan dengan 2 sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi merupakan pengelolaan yang terpusat dari daerah yang cakupannya luas dimana pengelolaan sampahnya dilakukan di TPA dengan metode *Sanitary Landfill* (sampah disini digunakan sebagai bahan untuk mengisi tanah yang akan diurug), pembakaran sampah (sampah yang dibakar adalah organik kering dan anorganik dengan alat incinerator dan panas yang dihasilkan oleh pembakaran sampah dapat digunakan sebagai pembangkit listrik), pengomposan (sampah organik digunakan untuk pengomposan dan dilakukan baik secara terbuka (aerob) maupun tertutup (anaerob)) dan recycling (pemanfaatan kembali untuk sampah yang dapat diolah kembali seperti plastik, besi dan alumunium). Mekanisme dalam sistem ini yaitu, sampah yang berasal dari rumah tangga akan diangkut ke TPS lalu diangkut ke TPA sehingga memerlukan biaya pengangkutan sampah yang cukup besar dan lahan untuk TPS dan TPA yang luas serta tenaga dan teknologi yang tinggi untuk pengelolaan sampahnya. Sistem lainnya yaitu desentralisasi dimana penggolongan sampah dan pengolahannya untuk dimanfaatkan kembali dilakukan di sumber sampah, dalam sentra pengumpulan dan penampungan sampah dapat dilakukan pada cakupan daerah yang lebih kecil seperti tingkat kelurahan atau kecamatan. Dalam sistem ini dapat mengurangi biaya untuk pengangkutan sampah dan meminimalisir besarnya lahan untuk TPA.

Pengelolaan sampah selanjutnya adalah pengelolaan sampah terpadu yang dapat dilakukan dengan metode 3R yaitu *Reduce, Reuse, Recycle*. Metode ini dapat dimulai sejak sampah dalam tahap pengumpulan, pengangkutan dan sistem pembuangan sampah. Lebih utama lagi, metode ini dapat digunakan sejak awal sampah dari sumbernya yang berkaitan langsung dengan peran aktif masyarakat sebagai penghasil sampah. Metode ini harus didukung pula oleh pemerintah dengan penyediaan sistem, fasilitas sarana dan prasarana yang baik pula.

Dalam metode pengurangan sampah dari sumbernya yang akan dilanjutkan dengan pengelolaan kompos, daur ulang dan pembakaran tentu akan mengurangi kebutuhan lahan untuk TPA dan mengurangi anggaran untuk biaya

pengangkutan sampah. Keuntungan lain yang didapatkan adalah untuk kesehatan masyarakat lebih meningkat, kebersihan kota dan kualitas lingkungan menjadi lebih baik lagi.

1.5.3 Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat

Berdasarkan definisi pengelolaan dari para ahli, dapat dipahami bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan dalam rangka memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pengelolaan yang baik diperlukan kegiatan-kegiatan pengelolaan sesuai pendapat dari Soewarno Handyaningrat. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka dalam hal pengelolaan sampah diperlukan keahlian dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam memanfaatkan sampah sebagai potensi yang ada di sekitar masyarakat.

Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat merupakan suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat sehingga masyarakat memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah yang dilakukan. Sedangkan peran pemerintah maupun lembaga lain hanya sebagai motivator dan fasilitator dalam kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan program.

Fungsi motivator adalah untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar mereka menjadi siap mencari solusi dalam permasalahan sampah melalui kegiatan pengelolaan sampah yang membuat masyarakat termotivasi untuk mengembangkan potensi mereka dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang utama. Peran sebagai motivator dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan mengajak masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri.

Sedangkan fungsi fasilitator adalah untuk memfasilitasi masyarakat agar tujuan dari pengelolaan sampah yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat tercapai dan dilakukan secara berkesinambungan. Peran sebagai fasilitator dilakukan dengan memfasilitasi apa yang dibutuhkan

oleh masyarakat, seperti kemampuan dalam pengelolaan sampah yang belum dimiliki atau kebutuhan lainnya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa fungsi fasilitator tidak boleh sampai membuat masyarakat bergantung sehingga diperlukan kemandirian yang dibentuk dalam diri mereka melalui upaya pemberdayaan masyarakat.⁴²

Berdasarkan definisi pemberdayaan masyarakat dari beberapa ahli maka peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat diperlukan sebagai upaya untuk membuat individu/kelompok/komunitas untuk menjadi mengerti, faham dan termotivasi untuk mengembangkan potensi mereka dan memanfaatkan peluang yang ada dalam tindakan mereka untuk mencapai tujuan dan membentuk kemandirian dalam diri mereka. Potensi yang ada dapat berupa kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang akan dikembangkan dan diberi peningkatan kapasitas, sedangkan peluang merupakan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat yang dapat dimanfaatkan sehingga dapat berguna untuk mereka.

Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat ini dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri dari sumbernya yang dapat dilakukan dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dimana hasil sampah kering dapat ditabung di Bank Sampah yang ada di lingkungan sekitar masyarakat dan sampah yang basah dapat dijadikan kompos. Konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini memerlukan kesadaran masyarakat untuk mau dan termotivasi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan sampah sehingga dapat mengurangi sampah yang akan diangkut ke TPA.

Dalam konteks penelitian ini, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Kampung Wisata Lingkungan. Dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah suatu upaya untuk membuat masyarakat sadar dan termotivasi untuk mengembangkan potensi mereka dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber yang utama yang dilakukan melalui rangkaian kegiatan pengelolaan dan berkesinambungan sehingga membentuk kemandirian

⁴² Sri Subekti. 2010. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat*. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi. Vol 1 No 1 hal 26-29

masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran terkait proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan mengetahui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya.

1.6 Definisi Konsep

1. Pemberdayaan Masyarakat : suatu upaya bagaimana membuat individu/kelompok/komunitas untuk menjadi mengerti, faham dan termotivasi untuk mengembangkan potensi mereka dan memanfaatkan peluang yang ada dalam tindakan mereka untuk mencapai tujuan dan membentuk kemandirian dalam diri mereka.
2. Pengelolaan: rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan dalam rangka memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sampah: hasil buangan dari kegiatan manusia yang sudah tidak terpakai lagi.
4. Pengelolaan Sampah: rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber yang utama untuk mencapai suatu tujuan yaitu peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah: suatu upaya untuk membuat masyarakat sadar dan termotivasi untuk mengembangkan potensi mereka dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber yang utama yang dilakukan melalui rangkaian kegiatan pengelolaan dan berkesinambungan sehingga membentuk kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

1.7 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian adalah seperangkat instrumen yang digunakan sebagai petunjuk/pedoman/panduan penelitian dalam menjawab permasalahan penelitian melalui pengetahuan ilmiah. Berdasarkan pandangan dari Creswell, metode

penelitian kualitatif merupakan metode yang mengandalkan data berupa teks dan gambar dan untuk analisisnya memiliki langkah-langkah unik serta memiliki sumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda.⁴³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena metode ini digunakan mengeksplorasi dan memahami makna dibalik fakta suatu fenomena sosial yang ada dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat di Kampung Wisata Lingkungan terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah oleh masyarakat. Dengan ini peneliti ingin mengeksplorasi dan memberikan gambaran rinci tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut sehingga dapat dijadikan contoh bagi kampung-kampung lain dalam pengelolaan sampahnya.

1.7.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif dimulai dengan rumusan masalah atau pertanyaan yang sudah didefinisikan dengan baik dan mencoba untuk menggambarkan secara akurat. Hasil penelitian deskriptif adalah gambaran secara rinci mengenai rumusan masalah atau jawaban untuk pertanyaan penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti berusaha memberi gambaran terperinci mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kampung Wisata Lingkungan Medokan Semampir Surabaya sehingga dapat dijadikan pembelajaran dan contoh bagi kampung-kampung lain.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan pada kebutuhan penelitian dalam melakukan pengambilan data penelitian baik primer maupun sekunder.

⁴³ Creswell, John W. 2017. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran edisi 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal. 245

⁴⁴ Newman, W. Laurence. 2014. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh Edition. Harlow, UK: Pearson Education Limited. Hal 38-39

Dalam pandangan Creswell, lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif ini lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja dan penuh perencanaan menggunakan metode *purposive* yaitu di RW 02 Kelurahan Medokan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya.⁴⁵

Alasan pemilihan lokasi ini karena Kampung Wisata Lingkungan sebagai tempat penelitian berada di RW 02 Kelurahan Medokan. Kampung Wisata Lingkungan ini telah mendapat beberapa penghargaan dalam kegiatan Merdeka Dari Sampah dan Surabaya Green and Clean. Sedangkan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya sebagai dinas yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kota Surabaya.

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang memberi informasi berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti baik data yang bersifat primer maupun sekunder. Pandangan dari Lincoln dan Guba, manfaat informan dalam penelitian adalah sebagai *sampling internal* atau untuk membantu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relatif singkat.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subjek penelitian yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan dalam suatu penelitian meliputi tiga macam yaitu:⁴⁶

1. Informan Kunci (*key informant*) : mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian;
2. Informan Utama : mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti;
3. Informan Tambahan : mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

⁴⁵ Creswell, John W. 2017. *Op.Cit* hal 253

⁴⁶ Suyanto, Bagong, dkk. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media Group hal 171-172.

Dari penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informannya, dimana subjek informan dipilih karena dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan penelitian ini.

Adapun informan dalam penelitian ini :

1. Informan Kunci :
 - Ketua RW 02 : Dodik Eko Setiawan
 - Wakil Ketua RT 01: Muhammad Dolani
 - Ketua RT 02 dan Fasilitator Lingkungan RW 2: Pujiati
 - Ketua RT 03 dan Ketua Bank Sampah MASIDOSI III :
Yeni Indah Setyowati
 - Ketua RT 04: Erwin Ariyanto
 - Ketua RT 05: Teguh Waluyo
 - Ketua RT 06: Endro Wahono
 - Ketua Bank Sampah MASIDOSI I: Hartini
 - Ketua Bank Sampah MASIDOSI II: Sri Mulatni
 - Ketua Bank Sampah MASIDOSI IV: Pamuji Rahayu
 - Ketua Bank Sampah MASIDOSI VI: Ibu Wandu
2. Informan Utama :
 - Masyarakat Kampung Wisata Lingkungan: Kasiyati
 - Masyarakat Kampung Wisata Lingkungan: Markiyem
 - Masyarakat Kampung Wisata Lingkungan: Sumani
 - Masyarakat Kampung Wisata Lingkungan: Kartina
 - Masyarakat Kampung Wisata Lingkungan: Rahayu
 - Masyarakat Kampung Wisata Lingkungan: Ika
3. Informan Tambahan: - Adi Candra, S. Si., M. Si (Tim Motivator Lingkungan-Sub bag. Pemberdayaan masyarakat DKRTH Kota Surabaya)

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu proses penelitian salah satu instrumen yang paling penting adalah data. Data digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian, data dapat berupa data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan pandangan dari Creswell sebagai berikut:

1. Observasi Kualitatif

Observasi kualitatif adalah ketika peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu yang berada di lokasi penelitian. Peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas yang berada di lokasi penelitian. Peneliti juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh.⁴⁷

Tujuan observasi adalah untuk memperoleh informasi yang relevan sehingga mempertajam dan mendukung data hasil wawancara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian dan melakukan pengamatan dalam pengelolaan sampah di Kampung Wisata Lingkungan. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dibuktikan dengan bukti pendukung berupa foto-foto yang diambil oleh peneliti.

2. Wawancara kualitatif

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan berdasarkan pada percakapan secara intensif dengan tujuan tertentu. Pandangan dari Creswell, dalam wawancara kualitatif peneliti melakukan *face to face* (wawancara secara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancari mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara seperti ini membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-minded*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.⁴⁸

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan antara peneliti kepada informan yang menjadi subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kampung Wisata Lingkungan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada seluruh informan yang sudah ditentukan sebelumnya, pada wawancara yang pertama yaitu pihak Dinas

⁴⁷ Creswell, John W. 2017. *Op.Cit* hal. 254

⁴⁸ *Ibid* hal 254

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Sub. Bagian Pemberdayaan Masyarakat selaku penanggungjawab pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian, wawancara kedua akan dilakukan kepada para informan kunci kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Wisata Lingkungan serta masyarakat di Kampung Wisata Lingkungan.

3. Dokumen-dokumen kualitatif

Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa dokumen publik (misalnya, Koran, makalah, laporan kantor) maupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail). Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan sebagai data sekunder yang digunakan untuk memperkuat temuan data primer serta menunjang data-data empirik yang ditemukan oleh peneliti.⁴⁹

Dengan teknik dokumentasi, peneliti berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen yang menurut peneliti relevan dan mampu untuk menjelaskan dan mengungkapkan fenomena permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Setelah dokumen tersebut terkumpul, kemudian dilakukan suatu analisis konten atau isi terhadap dokumen tersebut.

Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan atau dibutuhkan sebagai data sekunder yang digunakan untuk memperkuat temuan data primer sekaligus menunjang data-data empirik yang ditemukan oleh peneliti. Setelah dokumen-dokumen terkumpul, maka peneliti akan melakukan analisis dokumen-dokumen tersebut baik yang berasal dari berbagai sumber berita maupun dari dokumentasi pribadi yang dimiliki oleh Kampung Wisata Lingkungan.

4. Materi audio dan visual kualitatif

Pada kategori terakhir adalah materi audio dan visual kualitatif yang berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.⁵⁰

Pada konteks penelitian ini, materi audio dan visual digunakan untuk menambah kredibilitas data yang telah dikumpulkan. Adapun data yang dikumpulkan yaitu berupa foto atau dokumentasi yang berkaitan dengan

⁴⁹ *Ibid* Hal. 255

⁵⁰ *Ibid*.

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kampung Wisata Lingkungan.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik melalui proses wawancara, observasi maupun dokumentasi maka proses selanjutnya yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis data yang sudah didapatkan oleh peneliti serta membuat kesimpulan dari hasil analisis data dan informasi tersebut.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah didapat dari berbagai proses yang sudah dilakukan dalam mengumpulkan data. Analisis data mencakup menguji, menyortir, mengkategorikan, mengevaluasi, membandingkan, mensintesis, dan merenungkan (*contemplating*) data, juga meninjau kembali data mentah yang terekam.

Dalam pandangan Milles dan Huberman, alur kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:

1. *Data Condensation*

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan/atau pengubah data yang muncul dari catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Kondensasi data terjadi terus menerus sepanjang proyek yang berorientasi kualitatif. Bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, kondensasi data antisipatif terjadi ketika peneliti memutuskan (seringkali tanpa kesadaran penuh) kerangka kerja konseptual, kasus mana, pertanyaan penelitian mana, dan pendekatan pengumpulan data mana yang harus dipilih. Ketika pengumpulan data berlanjut, babak selanjutnya dari kondensasi data terjadi: menulis ringkasan, *coding*, mengembangkan tema, membuat kategori, dan menulis memo analitik. Proses kondensasi data berlanjut sampai setelah kerja lapangan atau laporan akhir selesai. Kondensasi data merupakan bagian dari analisis. Kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang,

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan akhir dan diverifikasi.⁵¹

2. *Data Display*

Secara umum, penyajian data adalah kumpulan informasi terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data yang dibahas dan diilustrasikan mencakup banyak jenis matriks, grafik, bagan, dan jaringan. Semua dirancang untuk mengumpulkan informasi yang terorganisir ke dalam bentuk yang mudah diakses dan ringkas sehingga analis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang dibenarkan atau melanjutkan ke langkah analisis selanjutnya yang ditunjukkan oleh penyajian data. Seperti halnya kondensasi data, penyajian data merupakan bagian dari analisis.⁵² Penyajian data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mentransformasi data-data yang relevan dengan fokus penelitian menjadi kata-kata dan kalimat yang mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Dari awal pengumpulan data, analis kualitatif mengartikan apa yang dimaksud dengan memperhatikan pola, penjelasan, aliran sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai. Kesimpulan juga diverifikasi sebagai hasil analisis. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran yang terlintas di benak analis selama penulisan dengan perjalanan singkat kembali ke catatan lapangan, atau mungkin menyeluruh dan rumit, dengan argumentasi yang panjang dan tinjauan di antara rekan kerja untuk mengembangkan “konsensus intersubjektif” atau dengan upaya ekstensif untuk mereplikasi temuan dalam kumpulan data lain. Makna yang muncul dari data harus diuji agar masuk akal, kokoh, dan mantap - hal itu disebut validitas. Kalau tidak, kebenaran dan kegunaannya tidak akan diketahui

Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kampung Wisata Lingkungan Medokan Semampir merupakan suatu kesimpulan yang sebelumnya di analisis dengan

⁵¹ Miles, M B., Huberman, A M., dan Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*. Third Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc hal 12

⁵² *Ibid.* Hal. 12-13

menggunakan temuan data empiris di lapangan. Data empiris yang ditemukan berasal dari hasil wawancara, hasil pengamatan peneliti di lapangan maupun dokumen yang telah didapatkan pada saat melakukan penelitian.

1.7.6 Teknik Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik uji keabsahan data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan gagasan yang melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang untuk meningkatkan akurasi.⁵³ Triangulasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan dan melakukan pemeriksaan kembali atas data-data yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi dapat dicapai dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara. Dalam proses ini peneliti membandingkan apa yang telah diamati oleh panca indera peneliti tentang kondisi yang terjadi pada lokasi penelitian kaitannya dengan fokus permasalahan penelitian dengan apa yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan.
- b. Membandingkan data dari dokumen tertulis dengan hasil wawancara. Peneliti membandingkan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang telah diperoleh mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kampung Wisata Lingkungan.
- c. Membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan yang berbeda. Informasi yang diperoleh dari satu informan yang telah ditentukan akan dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari informan lainnya mengenai topik yang sama.

Jadi, dalam hal ini peneliti membandingkan antara informasi yang diperoleh melalui wawancara dari para narasumber dengan dokumen yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti.

⁵³ Newman, W. Laurence. 2014. *Op.Cit* hal 166